

Analisis Dampak Belanja Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anak Dalam Rangka Desentralisasi Fiskal: Studi APBD Surabaya

Sintya Pramitasari, Nabil Nazhif Fikri Ahmad, Muhammad Salman Al Farisi, Muhamad Fatih Eko Cahyo, Delies Eky Purwandani, Muhammad Zuhail Mafazi, Navisa Syalwa, Melda Fadityah Hidayat, Ravienda Anita Fitri

Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya

Email: 24040674219@mhs.unesa.ac.id, 24040674227@mhs.unesa.ac.id, 24040674221@mhs.unesa.ac.id, 24040674226@mhs.unesa.ac.id, 24040674228@mhs.unesa.ac.id, 24040674234@mhs.unesa.ac.id, 24040674239@mhs.unesa.ac.id, meldahidayat@unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of regional expenditure in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Surabaya City and its impact on improving child welfare within the framework of fiscal decentralization. This study employs a descriptive qualitative approach using secondary data in the form of APBD documents, local government performance reports, and data on Children categorized under Social Welfare Problems (PMKS) for the period 2017–2024. The results indicate that the realization of regional expenditure is relatively high, particularly in operational expenditure, which ranges from 89% to 91%, while capital expenditure tends to fluctuate. Policy implementation is reflected through programs of the Social Affairs Office that have been streamlined to enhance the effectiveness of social services. The impact of regional expenditure is evident in the gradual decline in the number of children categorized under PMKS, indicating an improvement in child welfare in Surabaya City. Therefore, regional expenditure within the framework of fiscal decentralization can be considered relatively effective, although it still requires optimization in terms of program consistency, strengthening of capital expenditure, and the sustainability of child protection interventions.*

Keywords: *Fiscal Decentralization, Regional Expenditure, Child Welfare, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD).*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan anak dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen APBD, laporan kinerja pemerintah daerah, serta data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kategori anak periode 2017–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah tergolong tinggi, khususnya pada belanja operasi yang berada pada kisaran 89% hingga 91%, sementara belanja modal cenderung fluktuatif. Implementasi kebijakan tercermin melalui program-program Dinas Sosial yang disederhanakan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sosial. Dampak belanja daerah terlihat dari penurunan jumlah PMKS kategori anak secara bertahap, yang mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan anak di Kota Surabaya. Dengan demikian, belanja daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal dapat dinilai cukup efektif, meskipun masih memerlukan optimalisasi dalam aspek konsistensi program, penguatan belanja modal, dan keberlanjutan intervensi perlindungan anak.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Belanja Daerah, Kesejahteraan Anak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Received Feb 12, 2026; Revised March 22, 2026; Accepted May 29, 2026

* **Sintya Pramitasari:** Email: 24040674219@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia pada tahun 2025, dengan populasi sekitar 284–287 juta jiwa (United Nations, 2025). Seiring berjalannya waktu, kenaikan jumlah penduduk tersebut menjadi tidak sebanding dengan kapasitas yang dimiliki oleh suatu negara, yang mana mampu memicu berbagai permasalahan sosial. Menurut Kurniasih dan Ikhsan (2019), masalah sosial merupakan suatu kondisi ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial serta menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di Indonesia, berbagai permasalahan sosial yang kerap muncul, meliputi kemiskinan, kriminalitas, hingga ketidakharmonisan dalam keluarga. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan akibat permasalahan sosial tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam hal ini, kategori anak juga menjadi objek yang terdampak dari adanya permasalahan sosial di sebuah daerah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus melalui peraturan perlindungan anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak memerlukan dukungan pendanaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Regulasi tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan memerlukan perlindungan khusus agar perkembangan fisik, mental, serta sosialnya dapat berlangsung secara optimal.

Seorang anak tidak hanya diposisikan sebagai kelompok yang rentan, tetapi juga sebagai generasi yang akan melanjutkan pembangunan bangsa, sehingga pemenuhan hak-hak dasarnya menjadi kewajiban yang harus dipastikan oleh negara. Menurut Sinabutar dan Setianingsih (2015), anak-anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan perhatian dari orang tua, serta akses terhadap pendidikan yang layak dan kesempatan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sebayanya. Namun yang terjadi dilapangan justru sebaliknya, banyak anak yang masih mendapatkan perlakuan yang menyimpang, seperti korban penelantaran anak dan mempekerjakan secara paksa para anak di jalanan. Melihat permasalahan sosial yang menimpa beberapa kategori anak di Indonesia khususnya di Kota Surabaya, pemerintah menghadirkan berbagai program sebagai alat pemenuhan hak anak melalui Dinas Sosial guna meningkatkan kesejahteraan anak di Kota Surabaya. Perlu diketahui juga bahwa salah satu hal yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak adalah dukungan dan respon dari lingkungan sekitar. Sejatinya, lingkungan yang positif akan memberikan dampak yang baik terhadap kondisi an perkembangan anak.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Surabaya Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (Jiwa)
Tahun 2024**

Umur	Jumlah Penduduk Surabaya Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	98.070	0-4	98.070
5-9	118.098	5-9	118.098
10-14	126.914	10-14	126.914
15-19	124.481	15-19	124.481

Sumber Tabel : Bapak Pusat Statistik Kota Surabaya Tahun 2024

Data tersebut dapat digunakan untuk melihat gambaran jumlah penduduk berdasarkan usia, khususnya anak hingga remaja di Kota Surabaya pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk pada kategori anak hingga remaja cukup besar, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah khususnya pada aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya pemenuhan hak anak melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, agar kebutuhan dasar, perlindungan, dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi secara optimal seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia anak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber utama pembiayaan program milik pemerintah daerah, termasuk pada program dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Pada struktur APBD, terdapat komponen belanja daerah yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah agar dapat berjalan secara efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui belanja daerah, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai program penunjang kebutuhan dan kesejahteraan anak. Dalam implementasinya di Kota Surabaya, program yang dimaksud meliputi penanganan anak jalanan (anjol), pelayanan perlindungan anak, dan penyediaan rumah singgah. Dengan demikian, optimalisasi penggunaan belanja daerah menjadi hal yang penting untuk memastikan program-program tersebut dapat berjalan secara maksimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anak di Kota Surabaya.

Menurut Saputra (2013), penerapan desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Vebrianna et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa kesejahteraan anak tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh karakteristik keluarga dan modal sosial orang tua. Adanya kedua penelitian ini membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat, termasuk anak, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang baik serta kondisi keluarga dan lingkungan sosial, sehingga perlu upaya yang menyeluruh untuk meningkatkannya. Sebagian besar penelitian hanya terfokus pada hubungan antara kebijakan fiskal dan kesejahteraan secara umum tanpa mengkaji bagaimana optimalisasi anggaran dari program pemerintah daerah yang secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang mencakup kategori anak. Termasuk kedua penelitian tersebut yang masih belum secara spesifik mengkaji keterkaitan antara implementasi belanja daerah dalam APBD dengan kesejahteraan anak di tingkat daerah. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Kota Surabaya melalui optimalisasi anggaran program Dinas Sosial yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada komponen Belanja Daerah. Adanya penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara langsung hubungan antara implementasi belanja daerah dalam APBD dengan peningkatan kesejahteraan anak di tingkat daerah khususnya Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait implementasi belanja daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama, serta analisis data yang

dilakukan secara induktif dengan menekankan pada pemaknaan. Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi tertentu secara langsung, melainkan menggunakan studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan dokumen kebijakan, dengan fokus pada Kota Surabaya, khususnya peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anak melalui APBD. Data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi APBD Kota Surabaya Tahun 2021–2024, LAKIP Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2021–2024, Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024, serta data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya Tahun 2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dokumen seperti laporan keuangan daerah, data statistik, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan data belanja daerah, implementasi program sosial, dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak dengan teori desentralisasi fiskal dan belanja publik. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk melihat efektivitas belanja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anak sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengalokasian Dana dalam Belanja Daerah Kota Surabaya

Belanja daerah merupakan komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat, yang tercermin dari besarnya alokasi anggaran dalam APBD. Berdasarkan data APBD Kota Surabaya, belanja daerah dialokasikan ke dalam beberapa sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Alokasi belanja ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang memadai. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), pengalokasian belanja daerah yang dilakukan secara tepat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal di tingkat daerah.

Dalam konteks penelitian ini, belanja daerah yang berkaitan dengan sektor sosial memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan anak. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program yang bertujuan menangani anak dengan permasalahan sosial, seperti anak terlantar dan anak dalam kondisi rentan. Secara umum, belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang keduanya memiliki kontribusi berbeda terhadap kesejahteraan anak. Belanja operasi digunakan untuk mendukung kegiatan rutin dan pelayanan sosial secara langsung, seperti bantuan sosial, perlindungan anak, dan layanan pembinaan. Sementara itu, belanja modal lebih berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan anak dalam jangka panjang, seperti fasilitas pendidikan dan tempat pembinaan sosial. Menurut Mardiasmo (2018), belanja modal memiliki peran strategis dalam menghasilkan manfaat jangka panjang melalui penyediaan aset publik yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penetapan target dan realisasi anggaran menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penyerapan anggaran. Target anggaran mencerminkan perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah daerah, sedangkan realisasi menunjukkan tingkat implementasi program di lapangan. Perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana belanja daerah telah

dilaksanakan secara optimal serta implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, analisis terhadap tingkat penyerapan anggaran menjadi penting untuk melihat apakah alokasi yang telah direncanakan benar-benar terealisasi dan memberikan dampak nyata. Berikut disajikan data tingkat realisasi belanja daerah Kota Surabaya dalam empat tahun terakhir sebagai dasar analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2021–2024

Tahun	Uraian Belanja Daerah	Target	Realisasi	Persentase
2021	Belanja Operasi	7.550.834.552.911,00	6.771.433.976.328,20	89,68 %
	Belanja Modal	1.393.552.677.405,00	1.016.336.503.390,00	72,93 %
2022	Belanja Operasi	8.625.723.584.781,00	7.679.441.144.733,50	89,03 %
	Belanja Modal	1.998.526.419.610,00	1.766.030.466.528,00	88,37 %
2023	Belanja Operasi	8.760.559.740.322,00	7.858.879.310.450,50	89,71 %
	Belanja Modal	2.026.075.212.273,00	1.671.895.816.185,00	82,52 %
2024	Belanja Operasi	8.879.230.667.172,00	8.100.201.314.334,49	91,23 %
	Belanja Modal	2.615.637.913.521,00	1.897.241.994.668,00	72,53 %

Sumber: APBD Kota Surabaya Tahun 2021–2024 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan Tabel 4.1, realisasi belanja daerah Kota Surabaya selama periode 2021–2024 menunjukkan adanya perbedaan pola antara belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi secara konsisten memiliki tingkat realisasi yang tinggi, yaitu berada pada kisaran 89% hingga 91% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan rutin, seperti pelayanan publik dan program sosial, dapat direalisasikan secara optimal. Tingginya realisasi belanja operasi mengindikasikan bahwa program-program yang bersifat langsung, termasuk yang berkaitan dengan kesejahteraan anak seperti bantuan sosial dan perlindungan anak, memiliki tingkat implementasi yang relatif baik. Sebaliknya, realisasi belanja modal cenderung lebih rendah, yaitu berkisar antara 72% hingga 88%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana masih menghadapi kendala. Padahal, belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan anak dalam jangka panjang, seperti melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan sarana pembinaan sosial. Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih optimal dalam merealisasikan belanja jangka pendek dibandingkan belanja jangka panjang.

Sementara itu, fluktuasi persentase realisasi anggaran setiap tahunnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya akurat, proses birokrasi yang panjang terutama dalam pelaksanaan proyek belanja modal, serta faktor teknis di lapangan seperti kesiapan proyek dan perubahan kebijakan. Selain itu, adanya kebijakan penyesuaian atau refocusing anggaran juga turut mempengaruhi naik turunnya realisasi anggaran setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi tersebut tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan daerah, tetapi juga dinamika dalam proses perencanaan dan

implementasi kebijakan. Oleh karena itu, tingkat realisasi anggaran tidak hanya perlu dilihat dari besarnya, tetapi juga dari efektivitasnya dalam menghasilkan dampak nyata, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan anak.

Analisis Implementasi Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Daerah

Implementasi belanja daerah di Kota Surabaya dilakukan melalui berbagai program yang dikelola oleh perangkat daerah, salah satunya Dinas Sosial. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab permasalahan sosial, termasuk yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah program pembinaan dan perlindungan anak melalui fasilitas sosial seperti Kampung Anak Negeri, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pendidikan, serta perlindungan kepada anak-anak dengan permasalahan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diimplementasikan dalam bentuk program nyata yang menyasar kelompok rentan. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, kemampuan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program tersebut mencerminkan adanya kewenangan dan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Efisiensi dalam kerangka desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kecakapan pemerintah lokal dalam menyelaraskan tata kelola kebijakan dengan kebutuhan spesifik masyarakat di tingkat akar rumput (Oates, 1999). Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan adanya upaya implementatif melalui program-program yang langsung menyasar kelompok rentan, khususnya anak. Namun demikian, efektivitas implementasi tersebut masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan jangkauan program serta kebutuhan koordinasi antar lembaga, sehingga menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang besar belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi hasil di lapangan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2021–2022, Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki 10 program, yang kemudian disederhanakan menjadi 5 program utama sejak tahun 2023. Penyederhanaan ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan dalam kerangka desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan refocusing anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah. Pengurangan jumlah program tersebut tidak hanya bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program agar lebih terarah dan tidak tumpang tindih. Pemangkasan program dari 10 menjadi 5 juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah, bukan sekadar kuantitasnya. Dengan menggabungkan program-program yang memiliki tujuan serupa, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada prioritas utama, mempermudah pengelolaan serta pengawasan, dan meningkatkan potensi dampak program terhadap masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan anak. Kebijakan ini sejalan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 yang mendorong penyederhanaan dan penyeragaman program daerah. Dengan demikian, implementasi desentralisasi fiskal di Kota Surabaya tidak hanya terlihat dari besarnya alokasi anggaran, tetapi juga dari bagaimana pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah.

Tabel 3. Alokasi Rencana Anggaran Program Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2021-2024 (dalam Rupiah)

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
------------	------------	------------	------------

Program Rehabilitasi Sosial			
27.292.007.679	27.292.007.679	131.545.722.201	42.580.532.030
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
12.309.453.517	12.309.453.517	32.728.739.022	38.853.281.159
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			
1.368.575.662	1.368.575.662	1.570.784.529	2.419.308.841
Program Pemberdayaan Sosial			
243.846.608	243.846.608	5.236.361.640	5.549.769.822
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
17.020.729.014	17.020.729.014	19.319.405.859	20.275.693.634

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2021-2024 (diolah oleh penulis)

Jika dilihat lebih lanjut berdasarkan Tabel 4.2, alokasi anggaran pada program-program Dinas Sosial Kota Surabaya menunjukkan adanya dinamika yang cukup signifikan selama periode 2021–2024. Program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan anak, seperti Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Pemberdayaan Sosial, mengalami peningkatan anggaran yang cukup besar, khususnya pada tahun 2023. Program Rehabilitasi Sosial, misalnya, mengalami lonjakan dari sekitar Rp 27 miliar pada tahun 2021–2022 menjadi lebih dari Rp 131 miliar pada tahun 2023, sebelum kembali menurun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas kebijakan pemerintah daerah yang mulai lebih memfokuskan alokasi anggaran pada penanganan permasalahan sosial, termasuk yang berkaitan dengan anak. Dengan demikian, secara normatif, peningkatan anggaran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan dan pembinaan terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Namun demikian, fluktuasi anggaran yang terjadi, terutama penurunan pada beberapa program di tahun 2024, menunjukkan bahwa implementasi belanja daerah masih sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan dan kapasitas fiskal daerah. Lonjakan anggaran pada tahun 2023 dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari kebijakan refocusing dan penyederhanaan program, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih terpusat pada program-program utama. Sementara itu, penurunan pada tahun berikutnya mengindikasikan adanya proses evaluasi serta penyesuaian kembali terhadap efektivitas program yang telah dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran belum tentu secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan anak, apabila tidak diikuti dengan konsistensi dan kualitas implementasi program. Oleh karena itu, dalam konteks desentralisasi fiskal, efektivitas belanja daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh stabilitas kebijakan serta ketepatan dalam pelaksanaan program yang mampu menjawab kebutuhan nyata kelompok rentan, khususnya anak.

Dampak Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Anak

Dalam konteks desentralisasi fiskal, belanja daerah tidak hanya dipahami sebagai proses pengalokasian anggaran, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan belanja daerah, khususnya di sektor sosial, adalah sejauh mana program-program yang dilaksanakan mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, termasuk anak. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dampak belanja daerah perlu dilakukan dengan melihat perubahan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat sebagai output dari implementasi kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, dampak belanja daerah terhadap kesejahteraan anak dianalisis melalui data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kategori anak di Kota Surabaya. Data ini digunakan sebagai indikator untuk melihat perkembangan jumlah anak yang mengalami permasalahan sosial dari waktu ke waktu. Penurunan jumlah anak dalam kategori PMKS dapat diinterpretasikan sebagai adanya perbaikan kesejahteraan, sedangkan peningkatan jumlahnya menunjukkan bahwa permasalahan sosial masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, analisis terhadap data PMKS menjadi penting untuk menilai sejauh mana belanja daerah yang telah dialokasikan benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan anak.

Dalam rangka mengetahui dampak belanja daerah terhadap kondisi kesejahteraan anak di Kota Surabaya, diperlukan data empiris yang menunjukkan perkembangan jumlah anak dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Melalui data tersebut, terlihat sejauh mana perubahan jumlah anak yang mengalami permasalahan sosial dari waktu ke waktu guna menilai efektivitas anggaran pada program kesejahteraan anak oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, berikut disajikan data PMKS kategori anak di Kota Surabaya selama periode 2017–2024 sebagai dasar analisis lebih lanjut terkait dampak belanja daerah terhadap kesejahteraan anak.

Tabel 4. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kategori Anak di Kota Surabaya Tahun 2017–2024

No	Jenis PMKS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	34	92	92	84	23	23	16	14
2	Anak Terlantar	6.213	6.623	6.623	6.604	8.546	3.310	2.375	2.150
3	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	716	1.584	1.584	1.222	404	492	390	347
4	Anak Berhadapan Dengan Hukum	5	7	7	-	-	-	-	-
5	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	16	33	33	17	17	17	17	-

6	Anak Jalanan	77	65	65	64	34	57	35	29
7	Anak Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2024 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat adanya tren penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kategori anak di Kota Surabaya dalam kurun waktu 2017 hingga 2024. Penurunan ini tidak hanya menunjukkan arah yang positif, tetapi juga mencerminkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan anak secara bertahap. Penurunan yang cukup signifikan terlihat pada kategori anak terlantar yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, penurunan secara bertahap juga terjadi pada kategori lain seperti anak balita terlantar, anak jalanan, serta anak dengan disabilitas. Bahkan, pada kategori anak berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi tercatat. Kondisi ini menjadi indikator penting yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya dalam menangani permasalahan kesejahteraan anak.

Fenomena penurunan jumlah PMKS kategori anak tersebut mengindikasikan bahwa belanja daerah telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, khususnya anak. Tingginya realisasi belanja operasi memungkinkan pelaksanaan berbagai program yang berfokus pada anak, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan. Program-program tersebut berperan dalam menekan jumlah anak yang masuk dalam kategori PMKS. Di sisi lain, belanja modal turut mendukung melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang menunjang pemenuhan hak dan kebutuhan anak. Dengan demikian, struktur belanja daerah tidak hanya mencerminkan besaran pengelolaan anggaran, tetapi juga berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan anak.

Selaras dengan hal tersebut, belanja daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal menunjukkan adanya kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anak di Kota Surabaya. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dimanfaatkan melalui penyusunan dan pelaksanaan program yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal, seperti penanganan anak terlantar, perlindungan anak dari kekerasan, serta pemberdayaan sosial anak. Dampak dari kebijakan tersebut tercermin dari penurunan jumlah beberapa kategori PMKS anak secara signifikan. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa keberlanjutan dan konsistensi program tetap menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan anak dapat terjaga secara berkelanjutan. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal melalui belanja daerah di Kota Surabaya dapat dinilai cukup efektif, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek stabilitas kebijakan dan implementasi program. Dengan demikian, belanja daerah di Kota Surabaya tidak hanya menunjukkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

Implikasi dalam Konteks Desentralisasi Fiskal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Surabaya

mencerminkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah guna mendukung program kesejahteraan sosial, terutama yang berkaitan dengan anak. Melalui kewenangan pengelolaan APBD, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan prioritas anggaran sesuai kebutuhan masyarakat di daerahnya. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya alokasi anggaran pada berbagai program sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai bentuk pelaksanaan fungsi alokasi dalam teori *public finance* yang dikemukakan oleh Musgrave. Dalam hal ini, belanja daerah tidak hanya digunakan untuk menjalankan aktivitas pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan penyederhanaan dan *refocusing* program sejak tahun 2023 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program agar lebih terfokus pada kebutuhan prioritas masyarakat.

Implikasi lain dari desentralisasi fiskal dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam memprioritaskan anggaran pada program-program yang berkaitan langsung dengan penanganan permasalahan sosial anak. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Oates yang menyatakan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal karena proses pengambilan kebijakan dilakukan lebih dekat dengan kondisi daerah masing-masing. Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa implementasi belanja daerah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti terjadinya fluktuasi realisasi anggaran, perubahan prioritas pembangunan daerah, serta belum stabilnya pengalokasian anggaran pada beberapa program sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang dimiliki daerah, tetapi juga bergantung pada kualitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan kebijakan, dan keberlanjutan program yang dijalankan pemerintah daerah.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui belanja daerah di Kota Surabaya memberikan dampak yang cukup positif terhadap peningkatan kesejahteraan anak, yang tercermin dari menurunnya jumlah PMKS kategori anak dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa program-program sosial yang dilaksanakan pemerintah daerah telah berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan serta perlindungan anak sebagai kelompok rentan. Namun demikian, peningkatan kesejahteraan anak tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, melainkan juga dipengaruhi oleh ketepatan sasaran program, koordinasi antar instansi, serta evaluasi kebijakan yang dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya anak.

KESIMPULAN

Implementasi belanja daerah menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak, yang tercermin dari peningkatan alokasi anggaran pada sektor sosial serta penurunan jumlah anak dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki kontribusi positif terhadap perbaikan kondisi kesejahteraan anak dan dapat disimpulkan bahwa belanja daerah dalam APBD Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan anak sebagai bagian dari implementasi desentralisasi fiskal. Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan anggaran melalui berbagai program sosial, seperti Kampung Anak Negeri serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial yang menjangkau anak sebagai kelompok rentan. Namun demikian, efektivitas belanja daerah masih

belum optimal, terlihat dari fluktuasi jumlah anak jalanan serta berbagai kendala, seperti dominasi belanja operasional, keterbatasan data anak terlantar, kurangnya integrasi program, dan kecenderungan prioritas pembangunan yang lebih berfokus pada infrastruktur fisik dibandingkan pembangunan sosial.

REFERENSI

- Anggraini, A. D. (2022). Peran belanja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. *Jurnal Mahasiswa*, 4(4), 346–351.
- DetikJatim. (2024). 10 bulan, 167 anak jalanan dicakup Satpol PP Surabaya. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7631719/10-bulan-167-anak-jalanan-dicakup-satpol-pp-surabaya>
- Dinas Sosial Kota Surabaya. (2021-2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Ringkasan APBD Tahun 2021.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Portal data APBD pemerintah daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). Apa yang dimaksud dengan belanja daerah? <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-belanja-daerah>
- Djarmiko, A. P., Hariyoko, Y., & Soesiantoro, A. (2023). Implementasi program Kampung Anak Negeri Kota Surabaya (Studi pada UPTD Kampung Anak Wonorejo). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(5).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). APBN dan Transfer ke Daerah. <https://kementriankeuangan.com/kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Kajian fiskal regional tahun 2021.
- Kurniasih, N. F., & Ikhsan, F. K. (2019). Masalah sosial anak usia dasar. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 18(1), 111–136. <https://doi.org/10.29300/attalim.v18i1.1616>
- Mahasiswa Indonesia. (2023). Implementasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Surabaya 2023. <https://mahasiswaindonesia.id/implementasi-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-di-kota-surabaya-2023/>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Fiscal federalism 2022: Making decentralisation work*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Transparansi pengelolaan anggaran.

- Richard A. Msgrave. (1959). *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Saputra, B. (2013). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 123–135.
- Sarkoro, H. (2016). Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Keuangan Publik*.
- Sinabutar, R., & Setianingsih, E. S. (2015). Pemenuhan hak anak dalam keluarga dan lingkungan sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 45–53.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations. (2024/2025). *World Population Prospects 2024*. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. <https://population.un.org/wpp/>
- Vebrianna, N. R., dkk. (2024). Analisis tingkat kesejahteraan anak: Apakah karakteristik keluarga dan modal sosial orang tua berpengaruh. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1). <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.75118>
- Worldometer. (2025). Indonesia population 2025. <https://www.worldometers.info/world->